

## SISTEM JARINGAN SOSIAL NASIONAL (SJSN) INDONESIA

(Studi Kasus Persepsi Mahasiswa di Semarang)

Warno

Dosen Tetap STIE Semarang

### Abstrak

The government has been implementing programs aimed at 6 programs for the welfare of the community, namely:

- a) Family Hope Program (PKH)
- b) Health Assistance For Poor Families
- c) Help the poor education
- d) rice for the poor (Raskin)
- e) community targeted poverty alleviation program (PNPM)
- f) business credit (KUR)

The six pro-people program to reduce poverty and achieve social welfare, the government is drafting a new program is a continuation of the six program which is a program that aims to ensure the needs of people nationwide who were named National Social Network Systems (Navigation), and the plan was carried out in , 2014.

From the analysis using SPSS was also obtained large coefficient of determination ( $R^2$ ) is equal to 56.9%, this means that the dependent variable (welfare) can be explained by the six independent variables (PKH, JAMKESMAS, BOS, RASKIN, PNPM, KUR) and the rest amounted to 43.1% influenced by variables that do not exist in the study.

The program of the government is good and will be implemented as well as the implementers of the program is also receiving a good run, the results showed fairly good influence of the pro-people programs, but also to be seen there are many other factors that affect the welfare of the people outside the government program .

In addition to being critical of the government is the welfare of the people themselves, depending on how people attempt to change their lives when the state provides various facilities da variety of programs but no kerjasamanya eat would be impossible to realize Pancasila is prosperity for all the people of Indonesia.

Limitations of this study is that the sample taken was the perception of students Semarang so it would be better if the sample used is the recipient of pro-people programs, another limitation is that welfare dipengaruhi oleh many factors, especially from internal community itself so that other factors do not enter in research can have a big impact, the latter is perceived limitations of the study sample is not necessarily able to describe the recipients of the government's pro-people programs

**Kata Kunci** : Program Pro Rakyat, SJSN

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan isi dari Pancasila sudah 67 tahun ditetapkan dan selama itu pula negeri ini merdeka dan negara berkewajiban mewujudkan itu namun sampai saat ini belum tercapai. Berbagai program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan itu namun juga belum bisa, SSJN merupakan wacana yang diharapkan bisa menjadi jawabnya. Pelaksanaan Sistem Jaringan Sosial Nasional (SJSN) hingga kini masih menunggu peraturan pelaksana. Masih ada 11 peraturan pemerintah (PP) yang harus disiapkan.

Pemerintah berkewajiban melaksanakan SSJN untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, masyarakat berhak mendapat jaminan dibidang sosial juga dibidang ekonomi, saat ini masih belum terwujud hal tersebut, banyak masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan pokoknya, mereka belum mendapatkan pekerjaan bahkan ada yang untuk makan saja kesulitan.

Angka pengangguran masih cukup tinggi di Indonesia bahkan pengangguran yang terdidik yaitu mereka yang sudah menempuh perguruan tinggi juga persentasenya cukup tinggi, di jalan raya perkotaan tidak pernah sepi dari pengemis dan pengamen, dipedesaan yang masuk dalam kategori rumah tangga sangat miskin tinggi persentasenya. Muncul pertanyaan apakah sudah ada program dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, walaupun ada apakah sudah efektif program tersebut.

Pemerintah sudah membuat berbagai program untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, ada dibidang kesehatan, pendidikan dan lainnya. Ada enam program yang sudah dijalankan oleh pemerintah saat ini antara lain : Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan kesehatan untuk keluarga miskin, bantuan pendidikan keluarga miskin, beras untuk keluarga miskin (Raskin), program pengentasan kemiskinan bersasaran komunitas (PNPM), Kredit usaha rakyat (KUR)

Dari keenam program tersebut ada yang sudah secara nasional dijalankan namun juga ada yang baru disebagian wilayah Indonesia, selain itu seberapa besar pengaruh program tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat juga perlu dikaji.

## **Permasalahan**

Pemerintah berkewajiban mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia namun sampai saat ini belum terwujud :

1. Apa program yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkannya
2. Apa pengaruh program tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat

## **PEMBAHASAN**

### **Program Pro Rakyat**

#### **a. Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran Keluarga/Rumahtangga**

##### **1. Program Keluarga Harapan (PKH)**

Sejak digulirkan pada tahun 2007, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program unggulan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Program ini merupakan bentuk baru program penanggulangan kemiskinan setelah sebelumnya ada program bernama PPK, PNPM, BLT, JPS, dan bentuk program penanggulangan kemiskinan lainnya.

Tidak semua Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dapat menerima bantuan ini, karena sudah disebutkan bahwa sifat dari program ini yang bersyarat. Syarat yang dimaksud adalah bahwa Keluarga RTSM harus mempunyai kategori sebagai berikut : adanya Ibu Hamil, adanya Balita, adanya anak usia sekolah dasar, adanya anak usia sekolah menengah pertama.

Tidak hanya itu, mereka di awal program telah diminta komitmen oleh para Tenaga Sosial Pendamping yang menjadi ujung tombak di lapangan dari program ini. Komitmen dimaksud berupa komitmen kesehatan dan pendidikan, yaitu:

1. Bagi Ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya sekurang-kurangnya 4 kali selama masa kehamilan
2. Bagi yang mempunyai anak balita, harus mendatangi posyandu setiap bulan
3. Bagi yang mempunyai anak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, harus disekolahkan.

Program PKH berbeda jauh dengan BLT (bantuan langsung tunai), dalam program BLT rumah tangga yang menerima bantuan bebas menggunakan untuk keperluan apapun dan tidak disyaratkan apapun juga sehingga kemanfaatan dari program tersebut dirasa belum maksimal, sehingga ada pengembangan untuk PKH, penerima bantuan harus memenuhi berbagai syarat dan kewajiban serta mereka akan gugur menjadi penerima bila kedua hal tersebut tidak terpenuhi.

Di Indonesia sudah ada beberapa provinsi yang menjadi pelaksana program PKH dan pada tahun 2013 ini bertambah kabupaten penerima bantuannya, dari kementerian sosial sudah merekrut pendamping untuk pelaksanaan dari program ini sesuai yang direncanakan, bahkan tidak hanya mendampingi rumah tangga penerima bantuan tapi juga diharapkan pendamping bisa mengarahkan rumah tangga yang sudah layak tidak menerima bantuan, tidak menerima bantuannya ini bukan disebabkan karena mereka melanggar ketentuan tetapi karena mereka sudah tidak termasuk rumah tangga sangat miskin lagi sehingga mereka bisa menjadi penerima jenis program lain dari pemerintah.

## 2. Bantuan Kesehatan Untuk Keluarga Miskin

Kesehatan merupakan hal penting bagi kepentingan masyarakat, ketika dalam kondisi dakit maka tidak akan bisa beraktivitas secara optimal, tetapi banyak dari warga negara Indonesia yang belum mampu untuk membiayainya ketika dalam kondisi sakit. Oleh karena itu pemerintah membuat program agar setiap masyarakat bisa mendapatkan akses kesehatan.

Pemerintah sudah mempunyai program Jamkesmas yaitu jaminan kesehatan masyarakat program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tergolong miskin, mereka akan memperoleh kartu yang bisa dipakai untuk berobat di puskesmas sampai rumah sakit pusat secara gratis. Untuk mendapatkan kartu itu bisa diperoleh melalui pemerintah setempat dengan melengkapi persyaratan administratif dan bisa diperpanjang masa kartu itu sesuai setelah lima tahun.

Masyarakat akan mendapatkan jaminan kesehatan dari sakit ringan sampai yang berat oleh rumah sakit, selain itu sekarang juga sudah ada program pengembangan dari Jamkesmas yaitu jaminan persalinan gratis (Jampersal), pemerintah sudah menyiapkan desain untuk menjaga kesehatan masyarakat dari sejak masih dikandung sampai mereka mati, ketika masih dikandung dengan adanya pemeriksaan dan berbagai multivitamin yang diberikan, ketika lahir juga dijamin oleh pemerintah, waktu masih bayi ada berbagai imunisasi dan berbagai program

lain untuk menjaga kesehatan, ketika sudah dewasa dicover kesehatanya melalui Jamkesmas, hal itu diharapkan masyarakat bisa terjaga kesehatanya sehingga bisa beraktivitas secara optimal.

Saat ini berkembang pula jaminan kesehatan masyarakat miskin yang diprakarsai oleh pemerintah daerah (Pemkab) daerah tertentu yang sudah memiliki program jaminan kesehatan siapapun warga dikabupaten itu akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis dipuskesmas dengan syarat berkartu penduduk daerah setempat.

### 3. Bantuan pendidikan keluarga miskin

Dua program diatas yaitu PKH dan Jamkesmas itu belum bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera ketika ilmu pengetahuan dari masyarakat masih minimal, sehingga untuk bisa meningkatkan kapabilitas yaitu minimal masyarakat memiliki kemampuan dasar sampai memiliki kemampuan profesional pemerintah membuat beberapa program terkait hai itu.

Pemerintah melauai kementerian pendidikan membuat progam wajib belajar sembilan tahun, program itu didukung dengan pemberian bantuan operasi sekolah (BOS) yang diberikan kepada setiap siswa dari sekolah dasar sampai menengah pertama diseluruh indonesia, hal itu diharapkan masyarakat memiliki kemampuan dasar. Mulai tahun 2012 ada program pemberian bantuan untuk sekolah tingkat atas walaupun program ini belum secara nasioal karena baru tahap awal, dari program ini diharapkan masyarakat memiliki kemampuan dan ketrampilan secara khusus, selain program itu ada program Bidik Misi yaitu bantuan biaya kuliah dan biaya hidup bagi warga miskin yang lolos seleksi di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun swasta (PTS) di Indonesia, walaupun program ini jumlahnya terbatas hanya yang lolos seleksi secara ketat yang bisa mendapatkannya, dari program ini diharapkan masyarakat memiliki kemampuan yang profesional dan juga bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bangsa.

Pemerintah selain membuat program untuk pendidikan formal dari dasar sampai tinggi juga ada program lain untuk meningkatkan sumberdaya manusia seperti program “Bebas buta aksara” untuk mewujudkan itu pemerintah membuat pendidikan nonformal bagi masyarakat yang belum bisa membaca dan menulis, dengan kerjasama antara Kemendiknas dan berbagai perguruan tinggi melalui program kuliah kerja nyata (KKN).

4. Beras untuk keluarga miskin (Raskin)

Masyarakat memiliki tiga kebutuhan yaitu primer, sekunder dan tersier, kebutuhan primer contohnya makan, tempat tinggal, untuk kebutuhan yang pertama saja masih ada masyarakat yang tidak mampu memenuhinya, Pemerintah menyadari keluarga miskin belum tentu bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga ada program bantuan beras yang dibagikan setiap bulanya secara rutin.

5. Program pengentasan kemiskinan bersasaran komunitas

Program yang dipakai pada tahap ini adalah PNPM Mandiri, komunitas memiliki kontrol atas keputusan yang diambil dan sumberdaya yang digunakan, masyarakat miskin diperlakukan sebagai pelak utama dalam pengambilan keputusan, pemberdayaan terjadi pada saat masyarakat berinteraksi saling hormat menghormati, bertoleransi dan terdapat dukungan sosial, untuk mewujudkan itu pemerintah sudah membentuk institusi pendukung, akses informasi, dan lingkungan yang memadai untuk pengembangan aset.

Dampak sosial ekonomi PNPM :

- a. Menaikkan belanja rumah tangga
- b. Menurunkan tingkat pengangguran
- c. Menurunkan tingkat kemiskinan

6. Program pengentasan kemiskinan bersasaran usaha mikro dan kecil

Program yang dipakai oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan mengembangkan UKM dan sarana yang dipakai adalah melalui Kredit usaha rakyat (KUR), beberapa BUMN yang bergerak dibidang perbankan dipakai untuk menyalurkan kredit tersebut, kredit yang diberikan berbunga sangat kecil sehingga pengusaha diharapkan tidak kesulitan untuk mengembalikannya dan usahanya bisa berkembang lebih besar.

**b.Sistem Jaminan Sosial diluar Negeri**

1. Filipina

Manfaat yang diberikan kepada peserta SSS dan GSIS adalah (1) uang tunai selama peserta menderita sakit dan tidak bisa bekerja paling sedikit 4 (empat) hari, baik dirawat di rumah sakit dan di rumah sendiri. (2) Untuk peserta wanita yang hamil, keguguran,

atau melahirkan diberikan uang tunai sebesar antara P24.000-P31.200 (antara Rp 4,4 juta-Rp 6,2 juta). Manfaat lain (3) yang menjadi hak peserta adalah uang tunai yang dibayarkan secara lump-sum atau bulanan bagi peserta yang menderita cacat tetap, baik parsial maupun total yang bukan disebabkan oleh kecelakaan kerja. Manfaat selanjutnya (4) adalah jaminan hari tua (baik lump-sum maupun pensiun bulanan) ketika memasuki masa pensiun (60 tahun). Peserta juga berhak mendapatkan jaminan kematian (5) berupa uang tunai atau bulanan yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Dan yang terakhir (6) adalah jaminan kecelakaan kerja yang dibayarkan apabila terjadi kecelakaan kerja. Manfaat jaminan kecelakaan kerja ini dapat diterima bersamaan dengan manfaat program yang lain. Untuk setiap manfaat yang berhak diterima, peserta harus memenuhi persyaratan kepesertaan tertentu (*qualifying conditions*). Selain manfaat definitif, peserta juga dapat diberikan fasilitas kredit (*loan*) untuk menutupi kebutuhan uang tunai yang mendesak dengan bunga 6% setahun untuk pinjaman di bawah P15.000 dan 8% setahun untuk pinjaman lebih dari P15.000.

## 2. Amerika

Manfaat yang diberikan berupa jaminan pensiun yang dibayarkan menurut sistem *pay as you go* dimana iuran dibayarkan oleh tenaga kerja yang aktif bekerja dan pemberi kerja, sedangkan manfaat bagi pensiunan dibayarkan dari iuran tenaga kerja pada tahun yang sama. Artinya, pensiun bagi penduduk Amerika dibayar oleh tenaga kerja yang masih aktif, bukan dari tabungan pensiunan pada masa lalu. Begitu juga untuk jaminan cacat, pensiun ahli waris, dan Medicare. Jaminan pensiun diberikan berkaitan dengan tingkat penghasilan penduduk terakhir dan lamanya seorang penduduk mengiur. Besarnya pensiun yang menjadi hak setiap penduduk dapat dilihat dari Web yang setiap orang dapat menghitung atau melihat haknya setiap saat. Program Medicare hanya diberikan kepada seluruh penduduk yang mencapai usia 66 tahun atau lebih atau penduduk yang lebih muda akan tetapi menderita cacat tetap atau menderita penyakit ginjal yang memerlukan hemodialisa atau transplantasi. Jaminan kesehatan yang diberikan kepada pensiunan terbatas pada jaminan rawat inap di rumah sakit dan jaminan perawatan jangka panjang. Program ini disebut Medicare Part A yang menjadi hak semua lansia. Sedangkan untuk jaminan rawat jalan, penduduk lansia harus membeli asuransi kesehatan swasta dengan 75% premi disubsidi Medicare. Program rawat jalan ini bersifat sukarela

dengan insentif premi dari Medicare. Untuk mendapatkan hak jaminan sosial, setiap orang harus memenuhi kualifikasi masa iuran dan besarnya iuran yang dikonversi dalam sistem poin.

Sistem jaminan sosial yang akan dijalankan oleh Indonesia belum sempurna secara konsep terkait manfaat apa saja yang akan diperoleh masyarakat juga bagaimana menjalankannya serta dana untuk operasionalnya, namun itu merupakan rencana yang harus disempurkan dan harus dijalankan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu masih ada waktu untuk penyempurnaan konsep dan penyempurnaan sarana pendukung untuk memudahkan pelaksanaan program SSJN.

### **Kerangka Pemikiran.**

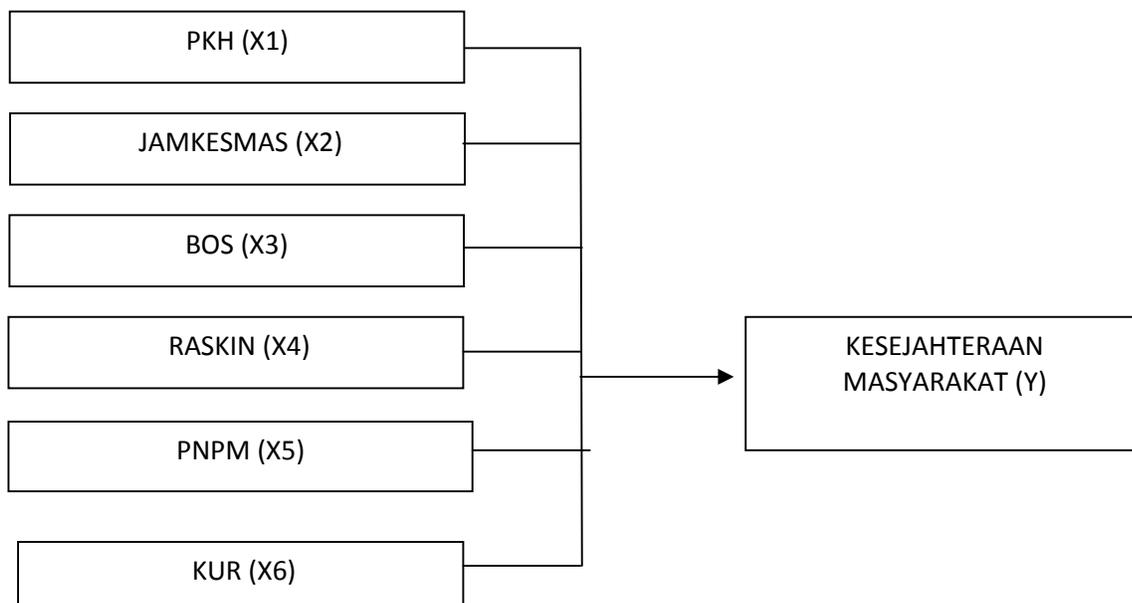
Pemerintah sudah menjalankan program prorakyat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, kalau dalam perhitungan logika program tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat dan meningkatkan derajat hidupnya, secara urut program dari pemerintah sudah ada untuk memenuhi berbagai kebutuhan dari masyarakat, bidang kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, tenaga kerja, pangan, tenaga kerja, dan keuangan

Ketika masyarakat masih miskin tidak punya penghasilan dan sulit untuk makan maka mereka akan menerima bantuan beras untuk kategori orang miskin, bila mereka mengandung atau mempunyai anak yang masih usia sekolah maka mereka mendapat bantuan PKH untuk kebutuhan hidup anaknya, bila mereka tidak mempunyai kecukupan uang untuk sekolah maka ada biaya operasi sekolah bahkan sampai perguruan tinggi, bila kesehatannya terganggu maka ada program JAMKESMAS, bila mereka tidak mempunyai pekerjaan maka ada KUR untuk mereka menjadi wirausaha, dan bila lingkungan mereka belum tercukupi baik keluarga atau masyarakat maka ada PNPM untuk menyelesaikannya, tahun 2012 juga sudah ada program bagi rakyat miskin yang belum mempunyai tempat tinggal yang layak maka bisa memperoleh bantuan program bedah rumah untuk memperbaiki rumahnya, ada enam program yang sudah dijalankan untuk bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera, keenam program tersebut secara keseluruhan bila dijalankan dengan baik maka akan sangat berdampak positif bagi rakyat, namun bila hanya secara parsial tidak secara komprehensif maka pengaruhnya akan kurang bisa dirasakan, misalkan saja ada masyarakat yang tergolong miskin dan mereka sudah mendapat

JAMKESMAS namun program yang lain tidak dia terima maka dia belum bisa kesejateranya terpenuhi karena baru bidang kesehatan saja, lain halnya bila keenam program tersebut bisa secara komprehensif diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat secara keseluruhan (yang berhak menerima) maka terwujudnya kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

Program prorakyat akan bisa mensejahterakan rakyat bila secara bersama-sama dijalankan dan diterima oleh masyarakat dan sebaliknya bila secara sendiri-sendiri program tersebut diterima maka pengaruhnya akan tidak maksimal.

Program pro rakyat oleh pemerintah digambarkan dalam bagan dibawah ini :



### Hipotesis.

Ho : Diduga program PKH (X<sub>1</sub>), JAMKESMAS (X<sub>2</sub>) BOS (X<sub>3</sub>), RASKIN(X<sub>4</sub>), PNPM (X<sub>5</sub>) dan KUR (X<sub>6</sub>) secara simultan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) di semarang.

Ha : Diduga program PKH (X<sub>1</sub>), JAMKESMAS (X<sub>2</sub>) BOS (X<sub>3</sub>), RASKIN(X<sub>4</sub>), PNPM (X<sub>5</sub>) dan KUR (X<sub>6</sub>) secara simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) di semarang.

Metode Penelitian.

Untuk mendapat data sehubungan dengan variable-variabel penelitian digunakan kuesioner. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 responden. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa yang ada di Semarang dan mereka berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah, peneliti mengambil sampel mahasiswa bukan subjek yang langsung menerima keenam program pro rakyat tersebut beralasan masyarakat yang memperoleh keenam program tersebut sangat sulit mencari dan sebagai penggantinya mahasiswa yang dipilih karena mereka bisa secara objektif memberikan informasi dari penelitian ini, mahasiswa akan memberikan persepsi sesuai dengan informasi yang mereka peroleh dan tentunya mereka sudah mengetahui dan memahami bahkan juga ada yang menjadi subjek dari program tersebut. Alat analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi berganda, koefisien determinasi dan alat uji F test, dengan bantuan program SPSS versi 16.0.

Hasil Analisis Regresi Berganda sebagai berikut :

Dari analisis secara parsial menggunakan SPSS versi 16 dapat dilihat dari keenam variabel independen (program pro rakyat dari pemerintah) yang signifikan hanya satu yaitu program BOS, dari hasil itu bisa diambil kesimpulan keenam program tersebut hanya satu yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, namun kalau dilihat secara langsung di masyarakat setiap program tersebut punya pengaruh ke masyarakat sehingga dari hasil perhitungan itu ada perbedaan hal itu dikarenakan setiap program dari pemerintah pengaruhnya bisa besar juga bisa kecil sehingga jawaban dari persepsi sampel penelitian juga berbeda.

Secara satu persatu program dari pemerintah hanya BOS yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelima lainnya tidak punya pengaruh, untuk nilai signifikansi BOS adalah 0,028 dan besarnya pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat 49%.

Tabel 1

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.754 <sup>a</sup>	.569	.509	.54492	.569	9.459	6	43	.000	2.361

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.754 <sup>a</sup>	.569	.509	.54492	.569	9.459	6	43	.000	2.361

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 16.0

Dari analisis menggunakan SPSS juga diperoleh besarnya Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) adalah sebesar 56,9%, hal ini berarti variabel dependen (kesejahteraan rakyat) bisa dijelaskan dari keenam variabel independen (PKH, JAMKESMAS, BOS, RASKIN, PNPM, KUR) dan sisanya sebesar 43,1% dipengaruhi oleh variabel yang tidak ada dalam penelitian.

Koefisien determinasi (R square) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R square yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel-variabel independen amat terbatas.

Dari hasil penelitian tersebut belum mencapai 60% program pemerintah bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat, hal itu bukan disebabkan oleh programnya yang salah atau pula salah sasaran namun karena masyarakat yang secara komprehensif menerima dan

### **Evaluasi Program Pro Rakyat Yang Sudah Dilaksanakan Pemerintah**

- a. Evaluasi program keluarga harapan (PKH)
  1. Data terkadang belum valid sehingga ada yang salah sasaran, keluarga miskin tidak memperoleh tapi yang cukup mendapatkan.
  2. Motivasi dari RTSM kurang
  3. Ketertiban dari peserta program sehingga tujuan yang seharusnya bisa dicapai tidak maksimal
  4. Program PKH belum merata di Indonesia, baru sebagian kabupaten yang melaksanakan program disebabkan oleh keterbatasan dana dari pemerintah juga kesiapan dari kabupaten penerima program.

b. Evaluasi Bantuan Kesehatan Untuk Keluarga Miskin

1. Pelayanan dari dinas kesehatan tidak maksimal sehingga tujuan yang diharapkan tidak optimal
2. Alokasi dana untuk program ini terbatas sehingga untuk penyakit yang berat sulit tertangani

c. Evaluasi Bantuan pendidikan keluarga miskin

1. Alokasi dana untuk program ini terbatas sehingga untuk membiayai pendidikan yang lebih tinggi bagi anak didik tidak mencukupi
2. Penyaluran dana tidak teratur sehingga menyulitkan sekolah

d. Evaluasi program raskin

1. Biaya distribusi daerah raskin tidak seragam bahkan beberapa kabupaten dan kota belum menyediakan distribusi
2. Kualitas beras raskin tidak sepenuhnya memenuhi standar konsumsi

e. Evaluasi pelaksanaan program KUR

1. Masih banyak ruang untuk meningkatkan penyalur KUR
2. Lembaga keuangan mikro sangat berpotensi memobilisasi dana untuk kepentingan usaha mikro dan kecil

f. Evaluasi pelaksanaan PNPM

1. Rencana pembangunan yang disusun berdasarkan prinsip PNPM belum terintegrasi dengan rencana pembangunan desa yang formal.
2. Kontribusi pemerintah daerah untuk pembiayaan PNPM masih bisa ditingkatkan.
3. Membuka akses pembiayaan untuk usulan kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal berbasis masyarakat.

Pemerintah sudah melaksanakan enam program yang pro rakyat, yang meliputi sebagai berikut : Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Kesehatan Untuk Keluarga Miskin, Bantuan pendidikan keluarga miskin, Beras untuk keluarga miskin (Raskin), Program pengentasan kemiskinan bersasaran komunitas (PNPM), Kredit usaha rakyat (KUR)

Dari enam program tersebut sudah dijalankan dengan berbagai keberhasilan juga berbagai kekurangannya pula, dari keenam program tersebut bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan tujuan jangka pendeknya mengurangi kemiskinan, setelah enam program tersebut dijalankan dan tujuan bisa dicapai maka pada tahun 2014 Pelaksanaan Sistem Jaringan Sosial Nasional (SJSN) akan dijalankan, program ini bertujuan untuk mewujudkan jaminan sosial bagi

seluruh takyat indonesia, mungkinkah bisa dilaksanakan dan apa pula sudah bisa diaplikasikan secara penuh itu masih menjadi pertanyaan besar, dari kesekian program yang sudah dijalankan masih saja banyak masyarakat yang belum sejahtera, dari hal tersebut muncul sebuah praduga apakah programnya yang kurang sempurna atautkah pelaksananya yang kurang profesional atautkah masyarakat indonesia sendiri yang sulit untuk diajak hidup sejahtera.

## **PENUTUP**

Pemerintah sudah melaksanakan program 6 program yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yaitu:

- a) Program Keluarga Harapan (PKH)
- b) Bantuan Kesehatan Untuk Keluarga Miskin
- c) Bantuan pendidikan keluarga miskin
- d) Beras untuk keluarga miskin (Raskin)
- e) Program pengentasan kemiskinan bersasaran komunitas (PNPM)
- f) Kredit usaha rakyat (KUR)

Keenam program tersebut pro rakyat untuk mengurangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah sudah membuat konsep program baru kelanjutan dari enam program tersebut yaitu program yang bertujuan menjamin kebutuhan masyarakat secara nasional yang diberi nama Sistem Jaringan Sosial Nasional (**SJSN**), dan rencana itu dilaksanakan pada tahun 2014.

Dari hasil analisis menggunakan SPSS juga diperoleh besarnya Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) adalah sebesar 56,9%, hal ini berarti variabel dependen (kesejahteraan rakyat) bisa dijelaskan dari keenam variabel independen (PKH, JAMKESMAS, BOS, RASKIN, PNPM, KUR) dan sisanya sebesar 43,1% dipengaruhi oleh variabel yang tidak ada dalam penelitian.

Program dari pemerintah sudah baik dan akan terlaksana secara baik ketika pelaksana dari program ini juga penerimanya menjalankan secara baik, dari hasil penelitian menunjukkan cukup baik pengaruh dari program pro rakyat tersebut namun juga perlu dicermati ternyata banyak faktor lain yang mempengaruhi kesejahteraan rakyat yang diluar program pemerintah tersebut.

Selain pemerintah yang menjadi penentu dari kesejahteraan rakyat adalah rakyat itu sendiri, tergantung dari bagaimana masyarakat berusaha untuk merubah hidupnya ketika negara memberikan berbagai fasilitas da berbagai program namun tidak ada kerjasamnya makan akan mustahil bisa mewujudkan pancasila yaitu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat indonesia.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah sampel yang diambil adalah persepsi dari mahasiswa kota semarang sehingga akan lebih baik bila sampel yang dipakai adalah masyarakat penerima program prorakyat, keterbatasan yang lain adalah kesejahteraan masyarakat itu dipengaruhi oleh banyak faktor terutama dari intern masyarakat itu sendiri sehingga faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian bisa berpengaruh besar, keterbatasan yang terakhir adalah persepsi dari sampel penelitian ini belum tentu bisa menggambarkan masyarakat penerima program prorakyat dari pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim, *Gejolak global gerus prospek ekonomi 2012*, Senin, 5 Desember 2011, 08:06 WIB, 2849 Views
- Boediono, (1992), *Seri Pengantar Ilmu Ekonomi No.2: Ekonomi Makro*, Yogyakarta; BPFE UGM
- Boediono, (1997), *Seri Pengantar Ilmu Ekonomi No.1: Ekonomi Mikro, Edisi II*, Cetakan ke-19, Yogyakarta: BPFE UGM (BOE)
- Faried Wijaya M., (1992), *Seri Pengantar Ekonomika Makro*, Yogyakarta ; BPFE UGM
- Faried Wijaya M., 1991, *Seri Pengantar Ekonomika Mikro*, Edisi II, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Brata, Sumadi Surya, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995.
- Meleong Lexy j, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Rosda Karya, 2006.
- Sugianto, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, Bandun: Alfabeta, 2006.
- Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penenlitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- <http://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2012/110294-Pelaksanaan-SJSN-Masih-Tunggu-11-Peraturan-Pemerintah>